

**PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PEMANFAATAN
TEKNOLOGI INFORMASI DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH
(Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali)**



NASKAH PUBLIKASI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar

Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

Disusun Oleh:

ARGO TRIHAPSORO
B200110313

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2015

HALAMAN PENGESAHAN

Yang bertanda tangan di bawah ini telah membaca naskah publikasi dengan judul:

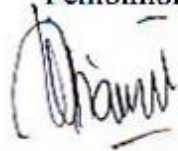
PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali).

Yang ditulis oleh:

Nama : Argo Trihapsoro
NIM : B 200 110 313
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Penandatanganan berpendapat bahwa naskah publikasi tersebut telah memenuhi syarat untuk diterima.

Surakarta, Oktober 2015
Pembimbing



(Dr. Erma Setiawati, Ak, MM)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta



(DR. Triyono, SE, M.Si)

**PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PEMANFAATAN
TEKNOLOGI INFORMASI DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH
(Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali)**

Argo Trihapsoro¹⁾, Dr. Erma Setiawati, Ak, MM²⁾, Program Studi Akuntansi,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta

Email: argotrihapsoro@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia (KSDM), Pemanfaatan Teknologi Informasi (PTI) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (KPD). Objek penelitian ini adalah SKPD Kabupaten Boyolali.

Metode pengambilan sampel menggunakan convenience sampling (sampling kemudahan). Adapun jumlah responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini sebanyak 42 responden dari 26 SKPD Kabupaten Boyolali. Teknik pengumpulan data dengan teknik survei dengan menyebarkan kuesioner kepada pegawai SKPD Kabupaten Boyolali. Teknik dan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia (KSDM), pemanfaatan teknologi informasi (PTI) dan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah (KPD).

Kata Kunci: Kualitas Sumber Daya Manusia (KSDM), Pemanfaatan Teknologi Informasi (PTI) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Kinerja Pemerintah Daerah (KPD)

PENDAHULUAN

Otonomi daerah diberlakukan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839). Pada tahun 2004, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi

daerah, sehingga digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan hal yang sangat penting dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan kekhasan daerahnya masing-masing.

Sebagai organisasi sektor publik, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kinerja yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Pemerintah dituntut agar selalu tanggap terhadap keadaan tuntutan lingkungannya.

Banyak indikator yang bisa menjadi patokan untuk menilai kinerja pemerintah, salah satunya adalah kualitas sumber daya manusianya. Menurut Wiley (2002) dalam Zetra (2009) mendefinisikan bahwa “Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut”. Kualitas yang minim dari sumber daya manusia pemerintahan dapat mengakibatkan kegagalan dalam melaksanakan kerja dan mencapai tujuan.

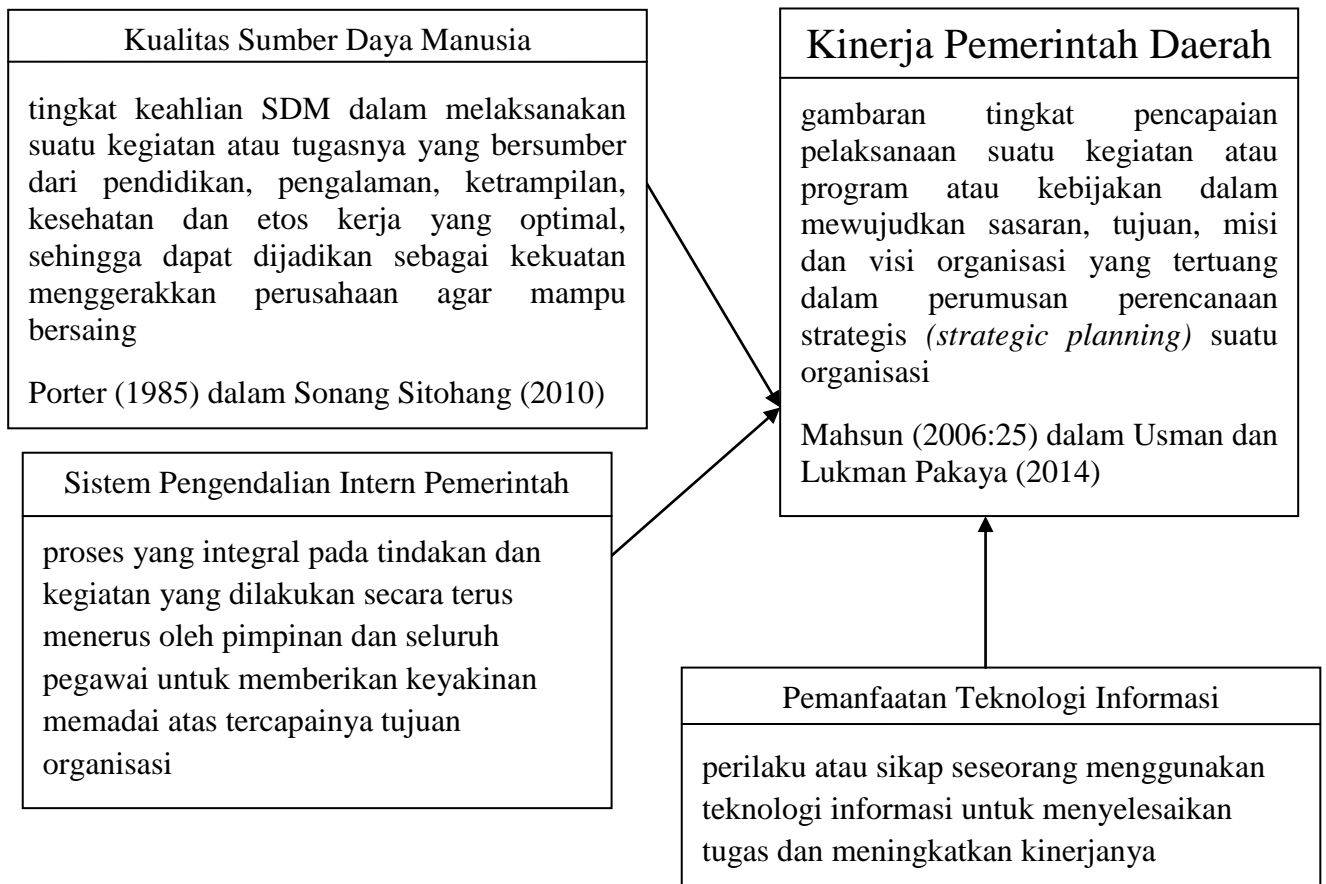
Faktor lain yang juga mempengaruhi kinerja pemerintah adalah pemanfaatan teknologi informasi. Menurut Jogiyanto (1995:7) dalam Febriady (2013), teknologi merupakan alat yang digunakan individual dalam penyelesaian tugas mereka, dalam konteks sistem informasi, teknologi terkait dengan sistem komputer (perangkat keras, perangkat lunak dan data) dan penggunaan jasa pendukung (training) yang memberikan panduan penggunaan dalam menyelesaikan tugas.

Selain kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern pemerintah juga berpengaruh terhadap kinerja pemerintah. Dalam penelitian Eka Widyaningtias (2014) disebutkan jika pengendalian intern lemah, maka kemungkinan terjadinya kesalahan, ketidakakuratan ataupun kecurangan sangat besar. Oleh sebab itu dalam lingkup pemerintah diperlukanlah sistem pengendalian intern pemerintah.

Berdasarkan latar belakang diatas maka masalah yang diteliti selanjutnya dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut: apakah ada pengaruh antara kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kinerja instansi pemerintah. Tujuan penelitian ini untuk menguji pengaruh kualitas sumber daya manusia, pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kinerja instansi pemerintah.

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah menyediakan informasi sebagaimana pentingnya pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern terhadap kinerja instansi pemerintah dan bagi pemerintah daerah diharapkan dapat menjadi masukan dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah khususnya akan meningkatkan kinerja instansi pemerintah daerah dalam mewujudkan *good governance*.

RERANGKA TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS



1. Pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap kinerja pemerintah daerah

Kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya berdasarkan latar belakang pendidikan, pelatihan yang diperoleh, pemahaman tentang tugasnya, kesiapan dalam melaksanakan perubahan dalam cara kerja dan penguasaan teknologi dan kesehatan yang prima.

Dengan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan kerjanya, seseorang akan lebih mudah memahami dan melaksanakan tugasnya. Ditambah dengan pelatihan yang diberikan dari instansi, maka membuat seseorang dari yang tidak bisa menjadi bisa dan yang sudah baik menjadi lebih baik. Selain itu, penguasaan teknologi dan kesehatan yang baik pun bisa menunjang kinerja. Dengan demikian, semakin baik kualitas sumber daya manusia, semakin baik pula kinerja pemerintah daerah.

Hal tersebut juga didukung oleh penelitian Agus Ali Suharto (2012) tentang pengaruh kualitas sumber daya manusia, komitmen dan motivasi terhadap kinerja pegawai pada inspektorat kabupaten kediri mengemukakan bahwa kualitas sumber daya manusia mempengaruhi kinerja pegawai inspektorat kabupaten kediri. Begitu juga dengan penelitian Lismawati (2012) tentang pengaruh kemampuan sumber daya manusia terhadap keterandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah menyatakan bahwa kemampuan sumber daya manusia berpengaruh terhadap keterandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian diatas maka diduga terdapat hubungan yang dapat dihipotesiskan dengan:

H1: kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah

2. Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kinerja pemerintah daerah

Pemanfaatan teknologi informasi adalah perilaku atau sikap seseorang menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerjanya. Secara umum pemanfaatan teknologi akan memberikan dampak positif karena memberikan kemudahan dan efisiensi waktu dan biaya. Jadi jika teknologi informasi dimanfaatkan secara optimal akan memberikan pengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

Hasil penelitian Wiwik Andriani (2010) tentang pengaruh kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan laporan keuangan pemerintah daerah (studi pada pemerintah daerah kabupaten Pesisir timur) menemukan bukti empiris bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan dan keterandalan laporan keuangan pemerintah daerah. Ini menunjukkan bahwa teknologi informasi akan meningkatkan ketepatanwaktuan dan keterandalan laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian bisa diartikan juga bahwa teknologi informasi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah dilihat dari ketepatanwaktuan dan keterandalan laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian diatas maka diduga terdapat hubungan yang dapat dihipotesiskan dengan:

H2: pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah

3. Pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kinerja pemerintah daerah

Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan

aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (PP No. 60 Tahun 2008). Dengan adanya SPIP yang baik dan dilaksanakan dengan optimal diharapkan akan memberikan pengaruh kepada kinerja pemerintah daerah.

Dalam penelitian Irine Chintya (2015) tentang pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kinerja instansi pemerintah di kota solok (studi pada SKPD kota Solok). Hasil penelitian Irine menyimpulkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah di kota Solok.

Berdasarkan uraian diatas maka diduga terdapat hubungan yang dapat dihipotesiskan dengan:

H3: sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah

METODE PENELITIAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, data kuantitatif ini didapatkan dari jawaban responden yang berupa pengisian angket. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai SKPD Kabupaten Boyolali. Sampel penelitian ini adalah seluruh pegawai SKPD Kabupaten Boyolali kecuali pegawai Kecamatan dan Kelurahan. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *convenience sampling*. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode survey, dimana alat pengumpulan data yang pokok dari sumber primer yaitu kuisisioner. Metode analisis data dengan menggunakan, Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas, Uji Heterokedastisitas, Uji Hipotesis, Uji t, Uji F, Uji Koefisien Determinasi (R^2). Adapun model persamaan statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$KPD = a + b_1KSDM + b_2PTI + b_3SPIP + e$$

GAMBARAN UMUM RESPONDEN

Frequencies

		Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman Kerja
N	Valid	42	42	42
	Missing	0	0	0

Frequency Table

		Jenis Kelamin			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-laki	24	57.1	57.1	57.1
	Perempuan	18	42.9	42.9	100.0
Total		42	100.0	100.0	

		Pendidikan			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SMA	0	0.0	0.0	0.0
	D3	7	16.7	16.7	16.7
	S1	31	73.8	73.8	90.5
	S2	4	9.5	9.5	100.0
	S3	0	0.0	0.0	100.0
	Total	42	100.0	100.0	

		Pengalaman Kerja			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	≤ 5 tahun	0	0.0	0.0	0.0
	6 - 10 tahun	13	31.0	31.0	31.0
	11 - 15 tahun	16	38.1	38.1	69.1
	16 - 20 tahun	9	21.4	21.4	90.5
	≥ 21 tahun	4	9.5	9.5	100.0
	Total	42	100.0	100.0	

Dari 42 responden diketahui bahwa 24 orang berjenis kelamin laki-laki dan 18 orang perempuan. Pendidikan terakhir responden paling banyak adalah S1 dan pengalaman kerja paling banyak adalah 11-15 tahun.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Berdasarkan hasil pengujian validitas dapat diketahui bahwa semua butir pertanyaan dalam variabel kualitas sumber daya manusia (KSDM), pemanfaatan

teknologi informasi (PTI), sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan kinerja pemerintah daerah (KPD) memiliki r_{hitung} (0,538 – 0,865) > r_{tabel} (0,304) pada taraf signifikansi sebesar 5% (0,05). Berarti semua item pernyataan dapat dikatakan valid.

Uji Reliabilitas

No	Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
1	KSDM	0.912	Reliabel
2	PTI	0.724	Reliabel
3	SPIP	0.953	Reliabel
4	KPD	0.831	Reliabel

Uji Normalitas

Variabel	Kolmogorov-Smirnov	<i>p value</i>	Keterangan
<i>Unstandardized Residual</i>	0.541	0.931	Data terdistribusi normal

Uji Heteroskedastisitas

Variabel	t Hitung	Sig	Keterangan
KSDM	0.935	0.356	Tidak terjadi heteroskedastisitas
PTI	-0.678	0.502	Tidak terjadi heteroskedastisitas
SPIP	0.748	0.459	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Uji Multikolinieritas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
KSDM	0.737	1.356	Tidak terjadi multikolinieritas
PTI	0.764	1.309	Tidak terjadi multikolinieritas
SPIP	0.922	1.084	Tidak terjadi multikolinieritas

UJI HIPOTESIS

Variabel	<i>Unstandardized</i>	t	Sig	Keterangan
	<i>Coefficients</i>			
	B			
(Constant)	5.536			
KSDM	0.429	3,588	0.001	Signifikan
PTI	0.287	2,445	0.019	Signifikan
SPIP	0.324	3,031	0.004	Signifikan
R ²	= 0.600	F hit	= 19.005	
Adjusted R ²	= 0.568	F tabel	= 2.85	
t tabel	= 2.024			

Dari hasil analisis regresi berganda di atas, dapat diperoleh persamaan sebagai berikut :

$$KPD = 5,536 + 0,429KSDM + 0,287PTI + 0,324SPIP + e$$

Berdasarkan persamaan regresi linier tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Nilai konstanta 5,536 artinya nilai ini akan konstan atau tetap meskipun nilai variabel kualitas sumber daya manusia (KSDM), pemanfaatan teknologi informasi (PTI), dan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) mengalami perubahan.
- Nilai koefisien regresi untuk variabel kualitas sumber daya manusia (KSDM) sebesar 0,429 bertanda positif yang berarti bahwa apabila kualitas sumber daya manusia (KSDM) semakin meningkat maka kinerja pemerintah daerah (KPD) juga semakin meningkat.
- Nilai koefisien regresi untuk variabel pemanfaatan teknologi informasi (PTI) sebesar 0,287 bertanda positif yang berarti bahwa apabila semakin meningkat pemanfaatan teknologi informasi (PTI) maka kinerja pemerintah daerah (KPD) juga semakin meningkat.

- d. Nilai koefisien regresi untuk variabel sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) sebesar 0,324 bertanda positif yang berarti bahwa apabila semakin meningkat sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) maka kinerja pemerintah daerah (KPD) juga semakin meningkat.

Uji F

Hasil uji F diperoleh nilai $F_{hitung} (19,005) > F_{tabel} (2,85)$ dengan nilai signifikannya sebesar 0,000 pada tingkat signifikan 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan variabel-variabel independen meliputi kualitas sumber daya manusia (KSDM), pemanfaatan teknologi informasi (PTI) dan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah (KPD) atau model regresi yang terbentuk fit untuk digunakan dalam analisis.

Uji Koefisien Determinasi R^2

Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,568 yang berarti variabilitas variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 56,8%. Hal ini berarti variabel-variabel independen meliputi kualitas sumber daya manusia (KSDM), pemanfaatan teknologi informasi (PTI) dan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) mempengaruhi kinerja pemerintah daerah (KPD) sebesar 56,8% sedangkan sisanya sebesar 43,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

1. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kualitas sumber daya manusia (KSDM) memiliki nilai t_{hitung} sebesar $3,588 > t_{tabel} (2,024)$. Sehingga kualitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah, itu berarti bahwa hipotesis pertama diterima (H_1 diterima). Hal ini dapat diartikan bahwa semakin meningkat kualitas sumber daya manusia yang bekerja dalam pemerintah daerah tersebut maka kinerja pemerintah daerah pun akan semakin meningkat dan sebaliknya semakin rendah kualitas sumber daya manusia yang ada di pemerintah daerah maka semakin rendah pula kinerja pemerintah daerahnya.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Agus (2012) yang menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia mempengaruhi kinerja pegawai inspektorat kabupaten Kediri. Kualitas sumber daya manusia berpengaruh paling dominan terhadap kinerja pegawai inspektorat kabupaten Kediri.

2. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil analisa uji t menunjukkan bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi (PTI) memiliki Nilai t_{hitung} sebesar $2,445 > t_{tabel}$ (2,024). Sehingga variabel pemanfaatan teknologi informasi (PTI) berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah, itu berarti bahwa hipotesis kedua diterima (H2 diterima). Hal ini dapat diartikan bahwa semakin meningkat pemanfaatan teknologi informasi yang tersedia di kantor pemerintah daerah tersebut maka semakin meningkat juga kinerja pemerintah daerah dan sebaliknya semakin rendah pemanfaatan teknologi informasi yang tersedia di kantor pemerintah daerah tersebut maka semakin rendah pula kinerja pemerintah daerahnya.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian dari Celviana dan Rahmawati (2010) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan melalui akuntansi pengendalian internal. Sedangkan hasil penelitian dengan model uji regresi menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

3. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Hasil analisa uji t menunjukkan bahwa variabel sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) memiliki Nilai t_{hitung} sebesar $3,031 > t_{tabel}$ (2,024). Sehingga variabel sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah, itu berarti bahwa hipotesis ketiga diterima (H3 diterima). Hal ini dapat diartikan bahwa semakin baik sistem pengendalian intern pemerintah dilakukan di kantor pemerintah daerah tersebut maka semakin baik juga kinerja pemerintah daerah dan sebaliknya semakin rendah sistem

pengendalian intern pemerintah dilakukan di kantor pemerintah daerah tersebut maka semakin rendah pula kinerja pemerintah daerahnya.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian dari Kadek, Anantawikrama dan Nyoman (2014) yang menunjukkan hasil bahwa pengendalian intern akuntansi dan pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap meningkatnya keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kualitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah, terbukti dari nilai $t_{hitung} (3,588) > t_{tabel} (2,024)$. Dengan demikian, hipotesis pertama (H1) dalam penelitian ini terdukung secara statistik pada taraf signifikan 0,05.
2. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah, terbukti dari nilai $t_{hitung} (2,445) > t_{tabel} (2,024)$. Dengan demikian, hipotesis kedua (H2) dalam penelitian ini terdukung secara statistik pada taraf signifikan 0,05.
3. Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah, terbukti dari nilai $t_{hitung} (3,031) > t_{tabel} (2,024)$. Dengan demikian, hipotesis ketiga (H3) dalam penelitian ini terdukung secara statistik pada taraf signifikan 0,05.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini mempunyai keterbatasan, sehingga perlu diperhatikan bagi peneliti-peneliti berikutnya. Adapun keterbatasan yang ada sebagai berikut:

1. Ruang lingkup penelitian ini hanya dilakukan di SKPD Kabupaten Boyolali saja, sehingga untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat secara general

maka perlu dilakukan penelitian yang lebih luas dengan menambahkan obyek penelitian lebih dari satu Kabupaten.

2. Sulitnya menjangkau seluruh sampel sehingga tidak semua sampel terpenuhi sebagai responden penelitian.
3. Penelitian ini menggunakan metode survey dengan menggunakan kuesioner saja tanpa dilengkapi dengan wawancara, sehingga kemungkinan mempengaruhi validitas hasil. Jawaban responden belum tentu mencerminkan keadaan yang sebenarnya dan akan berbeda jika data diperoleh dengan wawancara.
4. Penyebaran kuesioner pada beberapa SKPD masih memiliki kendala dalam prosedur perizinan dan pengisian kuesioner. Hal tersebut menyebabkan data yang diolah kurang optimal, untuk penelitian selanjutnya diharapkan responden yang dituju dapat melakukan pengisian kuesioner yang disebarakan.

Saran

Saran yang dapat diberikan bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Peneliti selanjutnya disarankan dalam melakukan penelitian serupa dapat melakukan penelitian di luar kabupaten Boyolali, agar hasil penelitian dapat digeneralisasi untuk ruang lingkup yang lebih luas sehingga dapat memperkuat validitas eksternal yang dibutuhkan untuk penelitian lebih lanjut.
2. Penelitian berikutnya dapat menambah variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi kinerja pemerintah daerah (KPD) seperti budaya organisasi, komitmen pegawai, ketaatan terhadap peraturan perundangan, penerapan akuntabilitas dan lain sebagainya.
3. Penelitian berikutnya dapat dilakukan dengan metode lain untuk mendapatkan data yang lengkap, misalnya dengan melakukan wawancara secara langsung dengan responden dalam pengisian kuesioner sehingga jawaban responden lebih mencerminkan jawaban yang sebenarnya.
4. Pemilihan waktu yang tepat dalam menyebarkan kuesioner dapat lebih dipertimbangkan oleh peneliti selanjutnya agar para responden memiliki

cukup waktu luang dalam mengisi kuesioner dan tidak mengganggu kesibukan responden dalam menjalankan pekerjaannya, sehingga pengisian kuesioner dapat maksimal sesuai kondisi sebenarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Ali Suharto. 2012. *Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Komitmen Dan Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Inspektorat Kabupaten Kediri*. Jurnal Ilmu Manajemen, Revitalisasi, Vol. 1, Nomor 3.
- Celviana Winidyaningrum & Rahmawati. 2010. *Pengaruh Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan Dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi (Studi Empiris Di Pemda SUBOSUKAWONOSRATEN)*. Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto.
- Eka Widyaningtias. 2014. *Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Kapasitas Auditor Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Se-Jabodetabek*. Skripsi. Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Negeri Islam Syarif Hidayatullah Jakarta. Jakarta.
- Febriady Leonard Sembiring. 2013. *Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keandalan Dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Padang)*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Padang.
- Kadek Hengki Primayana, Anantawikrama Tungga Atmadja & Nyoman Ari Surya Darmawan. 2014. *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pengendalian Intern Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng)*. E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 Vol:2 No:1.
- Lismawati. 2012. *Pengaruh Kemampuan Sumber Daya Manusia Terhadap Keterandalan Dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Jurnal Ekonomi Dan Perencanaan Pembangunan Vol. 04 No. 04 Juli –Desember 2012: 23-31.

Sonang Sitohang. 2010. *Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Pengrajin Sentra Industri Kecil Tenun Ikat*. *Ekuitas* Vol. 14 No. 1 Maret 2010: 57-81.

Usman Dan Lukman Pakaya. 2014. *Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Skpd Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo. Gorontalo.

Undang-undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Wiwik Andriani. 2010. *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan Dan Ketepatanwaktuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Timur)*. *Jurnal Akuntansi & Manajemen* Vol.5. No.1. Hal 69-80.

Zetra. 2009. *Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah*. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.